

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenanNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi Tahun 2009.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 yang diatur melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit – unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan Akuntabilitas ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi.

Sukabumi, 20 Januari 2009

**KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA SUKABUMI**

**Drs. H. SALEH MAKBULLAH, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19590703 198410 1 001

## **IHTISAR EKSEKUTIF**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi merupakan Lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi serta penanggulangan bencana.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi, bahwa Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana adalah “ Terwujudnya Pelayanan Berkualitas Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Bencana menuju Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera Tahun 2013 “.

Akan tetapi dalam perjalanannya, untuk mewujudkan Visi tersebut selain keberhasilan , masih ada beberapa hambatan / kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana (Dinsostek PB).

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2009 dapat terealisasi sesuai dengan target pencapaian.

Adapun hambatan / kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi adalah :

1. Kurang memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil di bidang ketenagakerjaan dan komputer.
2. Kurang memiliki SDM sebagai tenaga Fungsional ketenagakerjaan.

3. Kurangnya kemampuan dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada tingkat pelaksana/staf sebagai antisipasi tuntutan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.
4. Kurangnya ruang kerja (kantor), belum memiliki gedung kantor yang memadai.

## **LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN**

Untuk merealisasikan Visi dan Misi serta upaya untuk mengatasi kendala, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi memiliki nilai – nilai yang menjadi pedoman yang diyakini sebagai keluhuran jiwa yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh personil, antara lain :

### **1. Kerjasama**

Artinya komitmen diantara seluruh personal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi, ini berarti bahwa setiap personal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana harus menghindari ego sektoral dan memetingkan bidangnya sendiri dengan mengorbankan tujuan bersama, dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama yang harmonis antara bidang dan sekretariat untuk mewujudkan Visi dan Misi.

### **2. Disiplin**

Artinya bahwa setiap personal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana harus memegang komitmen untuk mempunyai sikap dan perilaku mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku, artinya senantiasa melaksanakan tugas dengan sebaik-bainya dan patuh sesuai ketentuan dan nilai organisasi yang berlaku.

### **3. Tanggungjawab**

Artinya bahwa didalam melaksanakan pekerjaan/tugas setiap personal senantiasa dibarengi dengan rasa penuh tanggungjawab dengan kata lain sikap bersedia dan mampu untuk menanggung akibat atas perilaku dan perbuatan yang dilakukannya.

#### 4. Pengabdian

Artinya sebagaimana diketahui bahwa organisasi kita dalah merupakan unit pelayanan, mengandung arti bahwa dalam setiap melaksanakan pekerjaan tidak semata – mata didasarkan pengharapan imbalan materi, namun harus dibarengi dengan pengabdian atau rela berkorban tenaga, waktu dan biaya sekalipun serta harus melayani, melaksanakan pelayanan sebelum masyarakat meminta.

#### 5. Kesejahteraan

Artinya kerjsama, disiplin pribadi, tanggung jawab dan pengabdian tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila tidak diikuti dengan pemahaman dan memperhatikan terhadap hak dan kewajiban masing – masing personal, oleh karena itu kesejahteraan merupakan hal penting dalam rangka mencapai Visi dan Misi dengan catatan mendahulukan kewajiban dari menuntut hak, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang berakibat terhadap peningkatan kesejahteraan.

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan tidak ada langkah selanjutnya apabila tidak ada langkah pertama, mulailah pelayanan pada hari ini / saat ini dari hal kecil.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>IHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Bidang Kewenangan .....	2
1.3. Core Area .....	2
1.4. Struktur Organisasi .....	5
<b>BAB. II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Rencana Strategis .....	6
2.2. Tujuan dan Sasaran .....	7
2.3. Kebijakan dan Program .....	7
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	11
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja .....	11
3.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja dan Capaian .....	23
3.4. Permasalahan dan Pemecahannya .....	24
3.5. Laporan Realisasi Anggaran .....	25
<b>BAB. IV PENUTUP .....</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
1. Format RS (Renstra)	
2. Indikator Capaian Renstra Dinsostek PB 2009 – 2013	
3. R.K.T.	
4. P.K.K.	
5. P.P.S.	

6. I.K.U.
7. TAPKIN
8. Struktur Organisasi
9. Daftar Nominatif Pegawai
10. Daftar Inventaris dan Aset
11. SK. Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun LAKIP
12. Laporan Arus Kas

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Sosial;
4. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Bidang Penanggulangan Bencana;
6. UPT dan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana adalah :

#### **Tugas Pokok :**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta penanggulangan bencana.

#### **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala daerah.

## **1.2. BIDANG KEWENANGAN**

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2008 tentang tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana, maka yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi adalah :

1. Bidang Sosial;
2. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Bidang Penanggulangan Bencana.

## **1.3. CORE AREA**

Dalam rangka mensosialisasikan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan penanggulangan Bencana untuk pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, ditentukan dengan cara analisis internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Analisis Internal
  - a. Kekeuatan (Strength)
    - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
    - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi;

- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana;
- Tersedianya sumber dana APBD dan APBN untuk mendukung kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi.

b. Kelemahan (Weaknes)

Selain memiliki beberapa kekuatan, ternyata terdapat pula beberapa kelemahan yang dapat menghambat kelancaran kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana, yaitu :

- Kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang ketenagakerjaan dan komputer;
- Belum memiliki tenaga fungsional yang terdiri dari :
  - Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan : 2 orang
  - Pegawai Perantara Hubungan Industrial : 1 orang
  - Pegawai Pengantar Kerja : 1 orang

2. Analisis Eksternal

a. Peluang (Oppurtunities)

Beberapa peluang yang akan sangat mendukung kelancaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana dalam mencapai Visi dan Misi adalah :

- Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar – pilar partisipasi masyarakat bidang sosial kesejahteraan sosial, antara lain :
  - Organisasi Sosial (Orsos)
  - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
  - Karang Taruna
  - Panti Sosial
- Adanya lembaga – lembaga latihan swasta sebanyak 25 buah

- Adanya BLKLN swasta sebanyak 2 buah
- Dibangunnya BLK Pemerintah Daerah sebanyak 1 buah
- b. Tantangan / Ancama (Threats)
  - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program – program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan ketenakerjaan
  - Mobilitas penyandang masalah sosial yang cukup tinggi
  - Pertumbuhan jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja
  - Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi dan semakin transparan

### **Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor kunci keberhasilan adalah beberapa hal yang harus berjalan baik jika ingin meyakinkan keberhasilan suatu organisasi.

Bila Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana memiliki kekuatan pada kunci – kunci keberhasilan dibidang ini maka cenderung memiliki kinerja yang prima. Berdasarkan hasil analisa internal dan eksternal (analisa SWOT), faktor kunci keberhasilan tersebut :

- adanya SDM yang profesional, handal, peka dan mempunyai kepedulian yang tinggi
- Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- Adanya perangkat peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, sosial dan penanggulangan bencana
- Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial
- Adanya iklim yang kondusif dalam penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial
- Adanya dukungan dana yang memadai

## **1.4 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana (terlampir).

## **BAB. II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD untuk mengarahkan kegiatan SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta langkah – langkah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan Visi dan Misi.

#### **VISI :**

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN BERKUALITAS BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA MENUJU KOTA SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2013 “.

#### **MISI**

Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi adalah:

1. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana.
2. Mewujudkan pengembangan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Organisasi-organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Lembaga-lembaga lainnya.
3. Mewujudkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pekerja/Buruh dan Korban Bencana.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

### Tujuan :

1. Memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kesejahteraan PMKS, Pekerja / Buruh dan Korban Bencana
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan berkembangnya peluang lapangan kerja dan kesempatan berusaha

### Sasaran :

1. Menurunnya jumlah PMKS
2. Tertanganinya korban bencana
3. Meningkatnya kompetensi, daya saing dan perlindungan tenaga kerja

## 2.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM

### Kebijakan :

Rumusan kebijakan ini disusun secara konsisten dan spesifik untuk menjamin agar Penyusunan Rencana Kerja menjadi sistematis dalam tatanan kerangka logis dan akuntabilitas.

Kebijakan-kebijakan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang diambil adalah :

- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana.
- Membina dan mendorong Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan kemampuannya baik kemampuan intelegensi, emosional maupun spiritual.

2. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana.

Strategi tersebut dirumuskan ke dalam kebijakan sebagai berikut :

- Optimalisasi pelayanan-pelayanan yang sudah tersedia.
- Memperluas jangkauan dan jaringan pelayanan yang berkualitas dalam rangka penanganan masalah sosial, pengangguran dan bencana.
- Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan sarana yang memadai dan berkualitas.

3. Meningkatkan kemampuan dan potensi PSKS, Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan, Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Lembaga-lembaga lainnya.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kinerja Lembaga-lembaga Sosial, Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan dan Organisasi Pekerja/Pengusaha sehingga mampu memberikan pelayanan dan pemecahan masalah sosial dan masalah ketenagakerjaan.
- Fasilitasi dan pemberian kemudahan untuk pengembangan jaringan Lembaga-lembaga Sosial dan Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pelayanan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana.

4. Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pekerja/Buruh dan Korban Bencana.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penganggur dan Korban Bencana.
- Peningkatan penanganan permasalahan sosial dan ketenagakerjaan (pengangguran) berbasis masyarakat.

- Pemberian stimulant/modal usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penganggur dan Korban Bencana.
5. Mengembangkan kualitas Tenaga Kerja dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut :

- Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan bagi penganggur dan penyandang masalah sosial.
  - Meningkatkan kualitas pelatihan sehingga menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang mampu bersaing di pasar kerja.
  - Meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelatihan yang berkualitas.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga/Dinas/Instansi Daerah, Provinsi dan Pusat.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan koordinasi dengan Lembaga/Dinas/Instansi yang berwenang dalam Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana.
- Peningkatan jalinan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial dan ketenagakerjaan.
- Pengembangan Sistem Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas.

## **Program**

1. Peningkatan kualitas SDM yang profesional dan religius dilaksanakan melalui program :
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur.
  - Program Pendidikan Kedinasan.

## 2. Program Bidang Sosial

- Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- Program Pembinaan Anak Terlantar.
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- Program Pengelolaan Areal Pemakaman (Taman Makam Pahlawan).

## 3. Program Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- Program Peningkatan Wilayah Transmigrasi.
- Program Transmigrasi Regional.

## 4. Bidang Penanggulangan Bencana

- Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana.
- Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.

### BAB. III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD.

Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran SKPD yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada penjelasan berikut ini.

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

#### A. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

**Sasaran** : Menurunnya jumlah PMKS

**Tabel 1 :**  
PPS Kondisi PMKS

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian	Target
1.	Menurunnya Pertumbuhan PMKS	%	10	5,6	56	
2.	Tertanganinya PMKS	%	10	6,8	68	
3.	Tersedianya Sarana Sosial (Panti, Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi)	Unit	10	11	122,2	

### 1. Menurunnya Pertumbuhan PMKS

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase pencapaian sasaran mencapai 144%, perhitungan ini diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah PMKS Tahun 2008 : 16.347
- Penambahan PMKS Tahun 2009 : 908
- Jumlah : 17.255
- Tingkat Pertumbuhannya adalah :  $\frac{908}{16.347} \times 100\% = 5,6\%$

Hal ini berarti bahwa pertumbuhan PMKS dapat ditekan seminimal mungkin dibawah 10%, hal ini disebabkan adanya partisipasi masyarakat terutama Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap PMKS.

Dengan demikian maka pembinaan kepada lembaga – lembaga kesejahteraan sosial berdampak positif terhadap penurunan pertumbuhan PMKS, sehingga efektivitas dan efisiensi dapat dilakukan.

### 2. Tertanganinya PMKS

Realisasi penanganan PMKS belum mencapai target, persentase capainnya baru mencapai 68%, perhitungan angka tersebut diperoleh dari data sebagai berikut :

- Jumlah PMKS Tahun 2009 : 17.255
- Yang ditangani : 1.175
- Sehingga hasil perhitungannya adalah :  $\frac{1.175}{17.255} \times 100\% = 68\%$

hal ini disebabkan karena :

- Sikap/perilaku PMKS yang apatis dan tidak mau menerima aturan – aturan dari Pemerintah
- PMKS bersifat mobile, bergerak cepat, baik kualitas maupun kuantitas
- Anggaran terbatas

### 3. Tersedianya Sarana Sosial

Pencapaian indikator sasaran ke tiga menggambarkan kenaikan yang signifikan, target tahun 2009 adalah 9 unit sedangkan realisasinya mencapai 11 unit, maka capaian persentasenya adalah :

$$\frac{11}{9} \times 100\% = 122,2\%$$

Sarana nomor tiga ini ada kaitannya sengan sasaran nomor satu semakin tinggi kepedulian masyarakat terhadap PMKS semakin kecil pertumbuhan PMKS.

Bertambahnya sarana sosial dari target 9 dan realisasi 11, memungkinkan PMKS untuk memanfaatkan sarana sosial yang ada di masyarakat.

**SASARAN** : Meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja

**Tabel 2 :**  
PPS Kondisi Ketenagakerjaan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian	Target
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	36,2	45,2	124%	
2.	Berkurangnya kasus-kasus perselisihan	Kasus	5	4	120%	
3.	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	22,5	25,6	113,7%	

#### 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Realisasi TPAK 45,2 lebih tinggi dari target 36,2 persentase capaian targetnya sebesar 124%. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}}$$

Artinya bahwa partisipasi angkatan kerja yang terdiri dari orang yang bekerja ditambah pencari kerja semakin besar disebabkan karena

terbukanya informasi lowongan pekerjaan dan minat masyarakat untuk bekerja semakin tinggi.

Tersedianya informasi lowongan kerja serta sosialisasi ketenagakerjaan kepada masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan TPAK, dengan demikian efisiensi anggaran dan efektivitas program dapat dilakukan.

## 2. Berkurangnya Kasus-kasus Perselisihan

Angka perselisihan hubungan industrial ada penurunan dari target 5 kasus menjadi 4 kasus, hal ini disebabkan pembinaan kepada perusahaan dan para pekerja / buruh lebih diintensifkan, sehingga kasus-kasus/permasalahan yang seringkali terjadi dapat diminimalisir dengan cara Bipartit, peran dan fungsi Bipartit lebih diutamakan dalam penyelesaian kasus-kasus perselisihan sehingga program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif.

Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Target : 5 Kasus

- Realisasi : 4 Kasus

$$\begin{aligned} \text{- Persentase Capaian} &: \frac{T - (R - T)}{T} \times 100\% \\ &= \frac{5 - (4 - 5)}{5} \times 100\% = \frac{5 + 1}{5} \times 100\% \\ &= \frac{6}{5} \times 100\% = 120\% \end{aligned}$$

## 3. Pencari Kerja yang ditempatkan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pencari kerja yang ditempatkan mencapai 25,6% melebihi dari target sebesar 22,5% sehingga persentase pencapaian targetnya mencapai 113,7%.

Angka tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah pencari kerja tahun 2009 = 6.207 orang

- Penempatan = 1.593 orang

$$\text{Capaian Target} : \frac{1.593}{6.207} \times 100\% = 25,6\%$$

Penempatan yang dilakukan melalui cara :

- Bursa kerja Khusus (BKK) :
- Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) :
- Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) :
- Antar Kerja Antar Negara (AKAN) :
- Lain - lain :

Oleh karena lowongan pekerjaan di Wilayah Kota Sukabumi sangat terbatas, maka kita melakukan berbagai terobosan dengan semua pihak terkait baik di dalam maupun di luar wilayah Kota Sukabumi.

**SASARAN** : Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan PMKS/Pekerja/  
Buruh dan Korban Bencana

**Tabel 3 :**  
PPS Kondisi Kesejahteraan PMKS/Pekerja/Buruh dan Korban Bencana

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian	Target
1.	Tertanganinya Korban Bencana	%	100	100	100	
2.	Jumlah Perusahaan yang bisa membayar upah sesuai UMK	%	75	80	106,6	

1. Tertanganinya Korban Bencana

Persentase pencapaiannya mencapai 100%, sesuai dengan target dan realisasinya, hal ini karena penanganan korban bencana bersifat rescue sehingga berapapun jumlah korban bencana yang menyangkut manusia harus segera ditangani dan tidak bisa ditunda, dengan diberinya bantuan tahap awal / bantuan darurat, maka tidak ada korban bencana yang tidak tertangani.

- Jumlah korban bencana tahun 2009 sebanyak 77 KK dan 12.210 jiwa
- Jumlah Korban bencana yang ditangani tahun 2009 sebanyak 77 KK dan 12.210 jiwa.

Kesimpulannya adalah bahwa semua korban bencana yang ada dapat ditangani.

2. Jumlah Perusahaan yang bisa membayar upah sesuai UMK

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang mampu memberikan upah kepada pekerjanya sesuai dengan UMK, tabel menggambarkan realisasinya mencapai 80% dari target 75%, sehingga persentase pencapaiannya 106,6%.

Hal ini juga ada kaitannya dengan menurunnya angka perselisihan, semakin sejahteranya buruh diperusahaan makin kecil kasus perselisihan antara pekerja dan pengusaha.

Dengan demikian maka program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan efektif untuk dilaksanakan karena memiliki dampak yang signifikan, pembinaan perusahaan dan sosialisasi aturan perundang-undangan dilaksanakan lebih intensif sehingga menimbulkan situasi yang kondusif antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Dari kondisi ketenagakerjaan tahun 2009 jumlah perusahaan sebanyak 485 perusahaan, sedangkan perusahaan yang telah membayar upah sesuai UMK adalah ..... perusahaan.

## B. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

**Tabel 4 :**  
PPK Bidang Sosial

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pelatihan Keterampilan bagi PMKS dan PSKS (Karang Taruna)	Input : Dana	Rp.	62.500.000	62.500.000	100		
		SDM	Orang					
		Output : Terlatihnya WRSE dan Karang Taruna	Orang	100	100	100		
		Out Come : Peserta Pelatihan dapat berusaha mandiri serta dapat meningkatkan penghasilan	%	80	80	100		
		Output : Meningkatnya partisipasi	Orang	14	14	100		
		Out Come : Terlaksananya Monitoring KUBE	Klp	35	25	71,4		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	- Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Input : Dana	Rp.	50.000.000	49.524.000	99,05		
		SDM	Rp.	62.500.000	59.545.000	95,2		
			Orang	-				
		Ooutput : - Terlatihnya Peserta Peksos dari Karang Taruna, PSM dan Orsos tentang UKS	Orang	100	100	100		
		- Terseleksinya Karang Taruna dan PSM Berprestasi Tk. Kota Sukabumi	Orang	2	2	100		
		- Terkirimnya Peserta Bimtek, rakor, Diklat diluar Kota Sukabumi	Orang	60	50	83		
		Out Come : Dapat melaksanakan pelayanan sosial di masyarakat	%	60	75	125		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan KIE dan kampanye sosial bagi PMKS	Input : Dana	Rp.	89.970.000	89.114.900	99,05		
		SDM						
		Output : Terbinanya WTS dan Gepeng	Orang	250	331	132		
			Out Come : Meningkatnya keterampilan WTS dan Gepeng	%	80	100	100	
	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak	Input : Dana	Rp.	58.765.000	58.751.250	99,06		
		SDM						
		Output : Terbinanya Anak Jalanan Anak Jalanan	Orang	200	338	169		
			Out Come : Adanya Perubahan Sikap dan Perilaku Anjal	%	80	80	100	
	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Input : Dana	Rp.	70.063.000	89.263.000	127,4		
		SDM	Orang	-				
		Output : - Terlaksana-nya Fasilitasi pengembalian orang terlantar	Orang	150	284	189,3		
			Out Come : Masyarakat mendapatkan perlindungan sosial	%	50	75	150	
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Input : Dana	Rp.	25.000.000	25.000.000	100		
		SDM	Orang	-				
		Output : Terlasananya Penyandang Cacat bidang menjahit	Orang	15	15	100		
		Out Come : Penyandang Cacat dapat bekerja di Perusahaan Garment	%	75	70	93,3		

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS dan PSKS

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 62.500.000	Output	: 100 orang
Realisasi	: Rp. 62.500.000	Realisasi	: 100 orang
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 30.000.000	Output	: 35
Realisasi	: Rp. 30.000.000	Realisasi	: 35
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Persentase pencapaian target input sebesar 99,05% sedangkan outputnya sebesar 100%.

Input	: Rp. 50.000.000	Output	: 100 orang
Realisasi	: Rp. 49.524.000	Realisasi	: 100 orang
% Capaian	: 99,05%	% Capaian	: 100%

b. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

Persentase pencapaian target input sebesar 95,2% sedangkan outputnya sebesar 100%.

Input	: Rp. 62.500.000	Output	: 60 orang
Realisasi	: Rp. 62.500.000	Realisasi	: 50 orang
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 83,3%

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Pelaksanaan KIE dan Kampanye Sosial bagi PMKS

Persentase pencapaian target input sebesar 99,05% sedangkan outputnya sebesar 132%.

Input	: Rp. 89.970.000	Output	: 250 orang
Realisasi	: Rp. 89.114.000	Realisasi	: 331 orang
% Capaian	: 99,05%	% Capaian	: 132,4%

b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Cacat dan Anak Jalanan

Persentase pencapaian target input sebesar 99,06% sedangkan outputnya sebesar 169%.

Input	: Rp. 58.765.000	Output	: 200 orang
Realisasi	: Rp. 58.751.250	Realisasi	: 338 orang
% Capaian	: 99,06%	% Capaian	: 169%

c. Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap, Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Persentase pencapaian target input sebesar 127,4% sedangkan outputnya sebesar 189,3%.

Input	: Rp. 70.063.000	Output	: 150 orang
Realisasi	: Rp. 89.263.000	Realisasi	: 284 orang
% Capaian	: 127,4%	% Capaian	: 189,3%

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eksa Trauma

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 25.000.000	Output	: 15 orang
Realisasi	: Rp. 25.000.000	Realisasi	: 15 orang
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%

**Tabel 5 :**  
**PPK Bidang Tenagakerja**

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga- kerjaan	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial	Input : Dana	Rp.	61,503,000	61,503,000	100	
		SDM	Orang				
		Output : Penentuan UMK 2009 Standar	Perusahaan	50	50	100	
		Pengajian perusahaan di Kota Sukabumi	Rp.	770000	770000	100	
	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Out Come : Dokumen digunakan sebagai bahan penetapan UMK Tahun 2009 oleh Gubernur Jawa Barat	%	80	80	100	
		Input : Dana	Rp.	118,297,000	118,297,000	100	
		SDM					
		Output : - Sosialisasi UMK Monitoring THR Perusahaan mengetahui UMK Tahun 2009 - Terpilihnya Perusahaan Pembina terbaik tenaga kerja wanita dan Pekerja Teladan Tk. Kota Suka bumi Tahun 2009 - Terlaksananya UU no. 71/1981 tentang Wajib lapor perusahaan : - Tersosialisasinya UMK 2009 - Termonitoring THR sebanyak 182 perusahaan - Terpilihnya Perusahaan pembina terbaik tenaga kerja wanita dan Pekerja Teladan Tk. Kota Sukabumi Tahun 2009 ke Provinsi - Terlaksananya UU No. 71/1981	Perusahaan	500	500	100	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kerjasama Diklat bidang bahasa Korea dan Elektro	Input : Dana	Rp.	98,500,000	98,500,000	100	
		SDM	Orang	-			
		Output : Terlatihnya pencari kerja dalam bidang keterampilan kerja bidang bahasa Korea dan Elektro	Orang	80	80	100	
Out Come : Meningkatnya keahlian Pencari Kerja di bidang Bahasa dan Elektro	Orang	80	80	100			
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Input : Dana	Rp.	1,060,000,000	1,060,000,000	100	
		Output : Gedung BLK	Unit	1	1	100	
		Out Come : Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	%	80	100	100	

5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 61.503.000	Output	: 50 Perusahaan
Realisasi	: Rp. 61.503.000	Realisasi	: 50 Perusahaan
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%
  - b. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 118.297.000	Output	: 500 Perusahaan
Realisasi	: Rp. 118.297.000	Realisasi	: 500 Perusahaan
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - a. Kegiatan Kerjasama Diklat

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 98.500.000	Output	: 80 Orang
Realisasi	: Rp. 98.500.000	Realisasi	: 80 Orang
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - a. Pembangunan BLK

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 1.060.000.000	Output	: 1 unit
Realisasi	: Rp. 1.060.000.000	Realisasi	: 1 unit
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%

**Tabel 6 :**  
**PPK Bidang Transmigrasi**

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Transmigrasi Regional	Sosialisasi Program Transmigrasi Regional	Input : Dana	Rp.	65,940,000	65,940,000	100	
		Output : Sosialisasi Program Transmigrasi Regional di 7 Kecamatan	Orang	350	350	100	
		Out Come : Adanya Pemahaman Aparat terhadap Program Transmigrasi	%	80	100	125	

8. Program Transmigrasi Regional

a. Kegiatan Sosialisasi Program Transmigrasi Regional

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input : Rp. 65.940.000      Output : 350 orang  
 Realisasi : Rp. 65.940.000      Realisasi : 350 orang  
 % Capaian : 100%      % Capaian : 100%

**Tabel 7 :**  
**PPK Bidang Penanggulangan Bencana**

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana	Input : Dana	Rp.	31,095,000	31,095,000	100	
		Output : Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Orang	150	150	100	
		Out Come : Adanya pemahaman dan kesiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana	%	75	75	100	

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input : Rp. 31.095.000      Output : 150 orang  
 Realisasi : Rp. 31.095.000      Realisasi : 150 orang  
 % Capaian : 100%      % Capaian : 100%

### 3.3. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA DAN CAPAIAN

**Tabel 8 :**  
**EVALUASI REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN**  
**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUKABUMI**

NO	SASARAN		SATU-AN	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN TARGET	
	URAIAN	INDIKATOR		2008	2009	2008	2009
1	Menurunnya Jumlah PMKS	- Menurunnya Pertumbuhan PMKS	%	9,9	5,6	100	144
		- Tertanganinya PMKS baru	%	9,8	6,8	100	68
		- Tersedianya sarana sosial (panti, panti asuhan, Panti Jompo)	Unit	9	11	100	122,2
2	Meningkatnya kesejahteraan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di Pasar Kerja	- Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	35,4	45,2	100	124
		- Pencari kerja yang ditempatkan	%	21,3	25,6	100	113,7
		- Berkurangnya kasus-kasus perselisihan	Kasus	5	4	100	120
3	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan PMKS/Pekerja/Buruh dan Korban Bencana	- Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK	%	75	80	100	106,6
		- Korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	100

Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian indikator sasaran tahun 2009 secara umum ada peningkatan dari realisasi tahun 2008, peningkatan realisasi pencapaian indikator sasaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Perubahan SOTK dari Kantor menjadi Dinas sehingga membawa dampak bagi peningkatan kinerja aparat secara keseluruhan.  
 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD menjadi lebih besar dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga berdampak kepada keberhasilan tugas.
2. Tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dan lembaga – lembaga kemasyarakatan serta stake holder yang cukup tinggi terhadap permasalahan – permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.
3. Motivasi dan kerjasama semua pihak dalam pencapaian visi misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan penanggulangan Bencana.

Selain keberhasilan ada juga kegagalan realisasi target yang belum tercapai, yaitu target tertanganinya PMKS tercapai 68% sedangkan tahun 2008 100%, hal ini disebabkan karena :

1. Sikap/perilaku PMKS yang apatis dan tidak mau menerima aturan – aturan dari Pemerintah.
2. PMKS bersifat mobile, bergerak cepat baik secara kualitas maupun secara kuantitas.
3. Anggarannya masih terbatas.

### **3.4. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA**

Secara umum pencapaian sasaran dan pencapaian kinerja kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta pencapaian melebihi target yang telah ditentukan, namun demikian masih ada kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, kendala tersebut antara lain :

- Rendahnya / kurangnya SDM
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana
- Belum memiliki gedung / kantor yang memadai
- Alokasi anggaran yang belum memadai

Adapun pemecahan dari kendala – kendala tersebut diatas adalah :

- Kerjasama / komitmen seluruh personil Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana untuk saling mendukung dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
- Penegakan disiplin bagi semua aparat
- Tanggung jawab
- Pengabdian
- Meningkatkan motivasi dan budaya kerja
- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

### 3.5 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi realisasi anggaran tahun 2009 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

**Tabel 9 :**  
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.013.305.000</b>	<b>1.208.518.000</b>	<b>195.213.000</b>
1.2	Belanja Pegawai	1.013.305.000	1.208.518.000	195.213.000
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.244.651.000</b>	<b>2.301.516.000</b>	<b>56.865.000</b>
2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.464.000	214.014.000	24.550.000
2.2	Program Peningkatan Program Sarana dan Prasarana Aparatur	112.121.000	112.121.000	0
2.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.500.000	10.500.000	0
2.4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.550.000	8.550.000	0
2.5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	92.500.000	92.500.000	0
2.6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	218.828.000	238.828.000	20.000.000
2.7	Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	112.500.000	112.500.000	0
2.8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.060.000.000	1.060.000.000	0
2.9	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	98.500.000	98.500.000	0
2.10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	179.800.000	179.800.000	0
2.11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban bencana Alam	31.095.000	31.095.000	0
2.12	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0	12.315.000	12.315.000
2.13	Program Transmigrasi Regional	65.940.000	65.940.000	0
2.14	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	64.853.000	64.853.000	0

### BAB. III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD.

Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran SKPD yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada penjelasan berikut ini.

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

#### A. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

**Sasaran** : Menurunnya jumlah PMKS

**Tabel 1 :**  
PPS Kondisi PMKS

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian	Target
1.	Menurunnya Pertumbuhan PMKS	%	10	5,6	56	
2.	Tertanganinya PMKS	%	10	6,8	68	
3.	Tersedianya Sarana Sosial (Panti, Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi)	Unit	10	11	122,2	

### 1. Menurunnya Pertumbuhan PMKS

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase pencapaian sasaran mencapai 144%, perhitungan ini diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah PMKS Tahun 2008 : 16.347
- Penambahan PMKS Tahun 2009 : 908
- Jumlah : 17.255
- Tingkat Pertumbuhannya adalah :  $\frac{908}{16.347} \times 100\% = 5,6\%$

Hal ini berarti bahwa pertumbuhan PMKS dapat ditekan seminimal mungkin dibawah 10%, hal ini disebabkan adanya partisipasi masyarakat terutama Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap PMKS.

Dengan demikian maka pembinaan kepada lembaga – lembaga kesejahteraan sosial berdampak positif terhadap penurunan pertumbuhan PMKS, sehingga efektivitas dan efisiensi dapat dilakukan.

### 2. Tertanganinya PMKS

Realisasi penanganan PMKS belum mencapai target, persentase capainnya baru mencapai 68%, perhitungan angka tersebut diperoleh dari data sebagai berikut :

- Jumlah PMKS Tahun 2009 : 17.255
- Yang ditangani : 1.175
- Sehingga hasil perhitungannya adalah :  $\frac{1.175}{17.255} \times 100\% = 68\%$

hal ini disebabkan karena :

- Sikap/perilaku PMKS yang apatis dan tidak mau menerima aturan – aturan dari Pemerintah
- PMKS bersifat mobile, bergerak cepat, baik kualitas maupun kuantitas
- Anggaran terbatas

### 3. Tersedianya Sarana Sosial

Pencapaian indikator sasaran ke tiga menggambarkan kenaikan yang signifikan, target tahun 2009 adalah 9 unit sedangkan realisasinya mencapai 11 unit, maka capaian persentasenya adalah :

$$\frac{11}{9} \times 100\% = 122,2\%$$

Sarana nomor tiga ini ada kaitannya sengan sasaran nomor satu semakin tinggi kepedulian masyarakat terhadap PMKS semakin kecil pertumbuhan PMKS.

Bertambahnya sarana sosial dari target 9 dan realisasi 11, memungkinkan PMKS untuk memanfaatkan sarana sosial yang ada di masyarakat.

**SASARAN** : Meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja

**Tabel 2 :**  
PPS Kondisi Ketenagakerjaan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian	Target
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	36,2	45,2	124%	
2.	Berkurangnya kasus-kasus perselisihan	Kasus	5	4	120%	
3.	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	22,5	25,6	113,7%	

#### 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Realisasi TPAK 45,2 lebih tinggi dari target 36,2 persentase capaian targetnya sebesar 124%. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}}$$

Artinya bahwa partisipasi angkatan kerja yang terdiri dari orang yang bekerja ditambah pencari kerja semakin besar disebabkan karena

terbukanya informasi lowongan pekerjaan dan minat masyarakat untuk bekerja semakin tinggi.

Tersedianya informasi lowongan kerja serta sosialisasi ketenagakerjaan kepada masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan TPAK, dengan demikian efisiensi anggaran dan efektivitas program dapat dilakukan.

## 2. Berkurangnya Kasus-kasus Perselisihan

Angka perselisihan hubungan industrial ada penurunan dari target 5 kasus menjadi 4 kasus, hal ini disebabkan pembinaan kepada perusahaan dan para pekerja / buruh lebih diintensifkan, sehingga kasus-kasus/permasalahan yang seringkali terjadi dapat diminimalisir dengan cara Bipartit, peran dan fungsi Bipartit lebih diutamakan dalam penyelesaian kasus-kasus perselisihan sehingga program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif.

Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Target : 5 Kasus

- Realisasi : 4 Kasus

$$\begin{aligned} \text{- Persentase Capaian} &: \frac{T - (R - T)}{T} \times 100\% \\ &= \frac{5 - (4 - 5)}{5} \times 100\% = \frac{5 + 1}{5} \times 100\% \\ &= \frac{6}{5} \times 100\% = 120\% \end{aligned}$$

## 3. Pencari Kerja yang ditempatkan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pencari kerja yang ditempatkan mencapai 25,6% melebihi dari target sebesar 22,5% sehingga persentase pencapaian targetnya mencapai 113,7%.

Angka tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah pencari kerja tahun 2009 = 6.207 orang

- Penempatan = 1.593 orang

$$\text{Capaian Target} = \frac{1.593}{6.207} \times 100\% = 25,6\%$$

Penempatan yang dilakukan melalui cara :

- Bursa kerja Khusus (BKK) :
- Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) :
- Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) :
- Antar Kerja Antar Negara (AKAN) :
- Lain - lain :

Oleh karena lowongan pekerjaan di Wilayah Kota Sukabumi sangat terbatas, maka kita melakukan berbagai terobosan dengan semua pihak terkait baik di dalam maupun di luar wilayah Kota Sukabumi.

**SASARAN** : Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan PMKS/Pekerja/  
Buruh dan Korban Bencana

**Tabel 3 :**  
PPS Kondisi Kesejahteraan PMKS/Pekerja/Buruh dan Korban Bencana

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian	Target
1.	Tertanganinya Korban Bencana	%	100	100	100	
2.	Jumlah Perusahaan yang bisa membayar upah sesuai UMK	%	75	80	106,6	

1. Tertanganinya Korban Bencana

Persentase pencapaiannya mencapai 100%, sesuai dengan target dan realisasinya, hal ini karena penanganan korban bencana bersifat rescue sehingga berapapun jumlah korban bencana yang menyangkut manusia harus segera ditangani dan tidak bisa ditunda, dengan diberinya bantuan tahap awal / bantuan darurat, maka tidak ada korban bencana yang tidak tertangani.

- Jumlah korban bencana tahun 2009 sebanyak 77 KK dan 12.210 jiwa
- Jumlah Korban bencana yang ditangani tahun 2009 sebanyak 77 KK dan 12.210 jiwa.

Kesimpulannya adalah bahwa semua korban bencana yang ada dapat ditangani.

2. Jumlah Perusahaan yang bisa membayar upah sesuai UMK

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang mampu memberikan upah kepada pekerjanya sesuai dengan UMK, tabel menggambarkan realisasinya mencapai 80% dari target 75%, sehingga persentase pencapaiannya 106,6%.

Hal ini juga ada kaitannya dengan menurunnya angka perselisihan, semakin sejahteranya buruh diperusahaan makin kecil kasus perselisihan antara pekerja dan pengusaha.

Dengan demikian maka program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan efektif untuk dilaksanakan karena memiliki dampak yang signifikan, pembinaan perusahaan dan sosialisasi aturan perundang-undangan dilaksanakan lebih intensif sehingga menimbulkan situasi yang kondusif antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Dari kondisi ketenagakerjaan tahun 2009 jumlah perusahaan sebanyak 485 perusahaan, sedangkan perusahaan yang telah membayar upah sesuai UMK adalah ..... perusahaan.

**B. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan**

**Tabel 4 :  
 PPK Bidang Sosial**

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pelatihan Keterampilan bagi PMKS dan PSKS (Karang Taruna)	Input : Dana	Rp.	62.500.000	62.500.000	100		
		SDM	Orang					
		Output : Terlatihnya WRSE dan Karang Taruna	Orang	100	100	100		
		Out Come : Peserta Pelatihan dapat berusaha mandiri serta dapat meningkatkan penghasilan	%	80	80	100		
		Output : Meningkatnya partisipasi	Orang	14	14	100		
		Out Come : Terlaksananya Monitoring KUBE	Klp	35	25	71,4		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	- Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Input : Dana	Rp.	50.000.000	49.524.000	99,05		
		SDM	Rp.	62.500.000	59.545.000	95,2		
			Orang	-				
		Ooutput : - Terlatihnya Peserta Peksos dari Karang Taruna, PSM dan Orsos tentang UKS	Orang	100	100	100		
		- Terseleksinya Karang Taruna dan PSM Berprestasi Tk. Kota Sukabumi	Orang	2	2	100		
		- Terkirimnya Peserta Bimtek, rakor, Diklat diluar Kota Sukabumi	Orang	60	50	83		
		Out Come : Dapat melaksanakan pelayanan sosial di masyarakat	%	60	75	125		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan KIE dan kampanye sosial bagi PMKS	Input : Dana	Rp.	89.970.000	89.114.900	99,05		
		SDM						
		Output : Terbinanya WTS dan Gepeng	Orang	250	331	132		
			Out Come : Meningkatnya keterampilan WTS dan Gepeng	%	80	100	100	
	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak	Input : Dana	Rp.	58.765.000	58.751.250	99,06		
		SDM						
		Output : Terbinanya Anak Jalanan Anak Jalanan	Orang	200	338	169		
			Out Come : Adanya Perubahan Sikap dan Perilaku Anjal	%	80	80	100	
	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Input : Dana	Rp.	70.063.000	89.263.000	127,4		
		SDM	Orang	-				
		Output : - Terlaksana-nya Fasilitasi pengembalian orang terlantar	Orang	150	284	189,3		
			Out Come : Masyarakat mendapatkan perlindungan sosial	%	50	75	150	
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Input : Dana	Rp.	25.000.000	25.000.000	100		
		SDM	Orang	-				
		Output : Terlasananya Penyandang Cacat bidang menjahit	Orang	15	15	100		
		Out Come : Penyandang Cacat dapat bekerja di Perusahaan Garment	%	75	70	93,3		

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS dan PSKS

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 62.500.000	Output	: 100 orang
Realisasi	: Rp. 62.500.000	Realisasi	: 100 orang
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 30.000.000	Output	: 35
Realisasi	: Rp. 30.000.000	Realisasi	: 35
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Persentase pencapaian target input sebesar 99,05% sedangkan outputnya sebesar 100%.

Input	: Rp. 50.000.000	Output	: 100 orang
Realisasi	: Rp. 49.524.000	Realisasi	: 100 orang
% Capaian	: 99,05%	% Capaian	: 100%

b. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

Persentase pencapaian target input sebesar 95,2% sedangkan outputnya sebesar 100%.

Input	: Rp. 62.500.000	Output	: 60 orang
Realisasi	: Rp. 62.500.000	Realisasi	: 50 orang
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 83,3%

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Pelaksanaan KIE dan Kampanye Sosial bagi PMKS

Persentase pencapaian target input sebesar 99,05% sedangkan outputnya sebesar 132%.

Input	: Rp. 89.970.000	Output	: 250 orang
Realisasi	: Rp. 89.114.000	Realisasi	: 331 orang
% Capaian	: 99,05%	% Capaian	: 132,4%

b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Cacat dan Anak Jalanan

Persentase pencapaian target input sebesar 99,06% sedangkan outputnya sebesar 169%.

Input	: Rp. 58.765.000	Output	: 200 orang
Realisasi	: Rp. 58.751.250	Realisasi	: 338 orang
% Capaian	: 99,06%	% Capaian	: 169%

c. Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap, Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Persentase pencapaian target input sebesar 127,4% sedangkan outputnya sebesar 189,3%.

Input	: Rp. 70.063.000	Output	: 150 orang
Realisasi	: Rp. 89.263.000	Realisasi	: 284 orang
% Capaian	: 127,4%	% Capaian	: 189,3%

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eksa Trauma

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 25.000.000	Output	: 15 orang
Realisasi	: Rp. 25.000.000	Realisasi	: 15 orang
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%

**Tabel 5 :**  
**PPK Bidang Tenaga Kerja**

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga- kerjaan	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial	Input : Dana	Rp.	61,503,000	61,503,000	100	
		SDM	Orang				
		Output : Penentuan UMK 2009 Standar	Perusahaan	50	50	100	
		Pengajian perusahaan di Kota Sukabumi	Rp.	770000	770000	100	
	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Out Come : Dokumen digunakan sebagai bahan penetapan UMK Tahun 2009 oleh Gubernur Jawa Barat	%	80	80	100	
		Input : Dana	Rp.	118,297,000	118,297,000	100	
		SDM					
		Output : - Sosialisasi UMK Monitoring THR Perusahaan mengetahui UMK Tahun 2009 - Terpilihnya Perusahaan Pembina terbaik tenaga kerja wanita dan Pekerja Teladan Tk. Kota Suka bumi Tahun 2009 - Terlaksananya UU no. 71/1981 tentang Wajib lapor perusahaan : - Tersosialisasinya UMK 2009 - Termonitoring THR sebanyak 182 perusahaan - Terpilihnya Perusahaan pembina terbaik tenaga kerja wanita dan Pekerja Teladan Tk. Kota Sukabumi Tahun 2009 ke Provinsi - Terlaksananya UU No. 71/1981	Perusahaan	500	500	100	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kerjasama Diklat bidang bahasa Korea dan Elektro	Input : Dana	Rp.	98,500,000	98,500,000	100	
		SDM	Orang	-			
		Output : Terlatihnya pencari kerja dalam bidang keterampilan kerja bidang bahasa Korea dan Elektro	Orang	80	80	100	
Out Come : Meningkatnya keahlian Pencari Kerja di bidang Bahasa dan Elektro	Orang	80	80	100			
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Input : Dana	Rp.	1,060,000,000	1,060,000,000	100	
		Output : Gedung BLK	Unit	1	1	100	
		Out Come : Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	%	80	100	100	

5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 61.503.000	Output	: 50 Perusahaan
Realisasi	: Rp. 61.503.000	Realisasi	: 50 Perusahaan
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%
  - b. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 118.297.000	Output	: 500 Perusahaan
Realisasi	: Rp. 118.297.000	Realisasi	: 500 Perusahaan
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - a. Kegiatan Kerjasama Diklat

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 98.500.000	Output	: 80 Orang
Realisasi	: Rp. 98.500.000	Realisasi	: 80 Orang
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - a. Pembangunan BLK

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input	: Rp. 1.060.000.000	Output	: 1 unit
Realisasi	: Rp. 1.060.000.000	Realisasi	: 1 unit
% Capaian	: 100%	% Capaian	: 100%

**Tabel 6 :**  
**PPK Bidang Transmigrasi**

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Transmigra- si Regional	Sosialisasi Program Transmigrasi Regional	Input : Dana	Rp.	65,940,000	65,940,000	100	
		Output : Sosialisasi Program Transmigrasi Regional di 7 Kecamatan	Orang	350	350	100	
		Out Come : Adanya Pemahaman Aparat terhadap Program Transmigrasi	%	80	100	125	

8. Program Transmigrasi Regional

a. Kegiatan Sosialisasi Program Transmigrasi Regional

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input : Rp. 65.940.000      Output : 350 orang  
 Realisasi : Rp. 65.940.000      Realisasi : 350 orang  
 % Capaian : 100%      % Capaian : 100%

**Tabel 7 :**  
**PPK Bidang Penanggulangan Bencana**

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pencegahan dan Penanggula- ngan Korban Bencana Alam	Pemantauan dan Penyebarlu- asan Informasi Bencana	Input : Dana	Rp.	31,095,000	31,095,000	100	
		Output : Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Orang	150	150	100	
		Out Come : Adanya pemahaman dan kesiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana	%	75	75	100	

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana

Persentase pencapaian targetnya sebesar 100% baik input maupun outputnya.

Input : Rp. 31.095.000      Output : 150 orang  
 Realisasi : Rp. 31.095.000      Realisasi : 150 orang  
 % Capaian : 100%      % Capaian : 100%

### 3.3. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA DAN CAPAIAN

**Tabel 8 :**  
**EVALUASI REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN**  
**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUKABUMI**

NO	SASARAN		SATU-AN	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN TARGET	
	URAIAN	INDIKATOR		2008	2009	2008	2009
1	Menurunnya Jumlah PMKS	- Menurunnya Pertumbuhan PMKS	%	9,9	5,6	100	144
		- Tertanganinya PMKS baru	%	9,8	6,8	100	68
		- Tersedianya sarana sosial (panti, panti asuhan, Panti Jompo)	Unit	9	11	100	122,2
2	Meningkatnya kesejahteraan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di Pasar Kerja	- Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	35,4	45,2	100	124
		- Pencari kerja yang ditempatkan	%	21,3	25,6	100	113,7
		- Berkurangnya kasus-kasus perselisihan	Kasus	5	4	100	120
3	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan PMKS/Pekerja/Buruh dan Korban Bencana	- Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK	%	75	80	100	106,6
		- Korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	100

Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian indikator sasaran tahun 2009 secara umum ada peningkatan dari realisasi tahun 2008, peningkatan realisasi pencapaian indikator sasaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Perubahan SOTK dari Kantor menjadi Dinas sehingga membawa dampak bagi peningkatan kinerja aparat secara keseluruhan.  
 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD menjadi lebih besar dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga berdampak kepada keberhasilan tugas.
2. Tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dan lembaga – lembaga kemasyarakatan serta stake holder yang cukup tinggi terhadap permasalahan – permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.
3. Motivasi dan kerjasama semua pihak dalam pencapaian visi misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan penanggulangan Bencana.

Selain keberhasilan ada juga kegagalan realisasi target yang belum tercapai, yaitu target tertanganinya PMKS tercapai 68% sedangkan tahun 2008 100%, hal ini disebabkan karena :

1. Sikap/perilaku PMKS yang apatis dan tidak mau menerima aturan – aturan dari Pemerintah.
2. PMKS bersifat mobile, bergerak cepat baik secara kualitas maupun secara kuantitas.
3. Anggarannya masih terbatas.

### **3.4. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA**

Secara umum pencapaian sasaran dan pencapaian kinerja kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta pencapaian melebihi target yang telah ditentukan, namun demikian masih ada kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, kendala tersebut antara lain :

- Rendahnya / kurangnya SDM
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana
- Belum memiliki gedung / kantor yang memadai
- Alokasi anggaran yang belum memadai

Adapun pemecahan dari kendala – kendala tersebut diatas adalah :

- Kerjasama / komitmen seluruh personil Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana untuk saling mendukung dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
- Penegakan disiplin bagi semua aparat
- Tanggung jawab
- Pengabdian
- Meningkatkan motivasi dan budaya kerja
- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

### 3.5 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi realisasi anggaran tahun 2009 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

**Tabel 9 :**  
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.013.305.000</b>	<b>1.208.518.000</b>	<b>195.213.000</b>
1.2	Belanja Pegawai	1.013.305.000	1.208.518.000	195.213.000
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.244.651.000</b>	<b>2.301.516.000</b>	<b>56.865.000</b>
2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.464.000	214.014.000	24.550.000
2.2	Program Peningkatan Program Sarana dan Prasarana Aparatur	112.121.000	112.121.000	0
2.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.500.000	10.500.000	0
2.4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.550.000	8.550.000	0
2.5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	92.500.000	92.500.000	0
2.6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	218.828.000	238.828.000	20.000.000
2.7	Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	112.500.000	112.500.000	0
2.8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.060.000.000	1.060.000.000	0
2.9	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	98.500.000	98.500.000	0
2.10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	179.800.000	179.800.000	0
2.11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban bencana Alam	31.095.000	31.095.000	0
2.12	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0	12.315.000	12.315.000
2.13	Program Transmigrasi Regional	65.940.000	65.940.000	0
2.14	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	64.853.000	64.853.000	0

## **BAB. IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi merupakan suatu gambaran kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana dalam rangka melaksanakan tupoksinya serta pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan sistem akuntabilitas yang merupakan penjabaran keberhasilan dan kegagalan kinerja kegiatan selama tahun 2009.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana tahun 2009 merupakan implementasi dari APBD Tahun 2009 secara garis besarnya dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sasaran dan kegiatan.

Secara umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan penanggulangan Bencana telah mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik, namun masih ada kekurangan dan kendala dalam melaksanakan tupoksinya.

Kendala / permasalahannya, antara lain :

- Rendahnya / kurangnya SDM
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana
- Belum memiliki gedung / kantor yang memadai
- Alokasi anggaran yang belum memadai

Langkah – langkah mengatasi kendala :

- Kerjasama / komitmen seluruh personil Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana untuk saling mendukung dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

- Penegakan disiplin bagi semua aparat
- Tanggung jawab
- Pengabdian
- Meningkatkan motivasi dan budaya kerja
- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi Tahun 2009 disajikan dalam beberapa format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP 2009, format – format tersebut adalah :

- RKT
- PPS
- PKK
- Evaluasi PPS
- Evaluasi PKK

Demikian kiranya penyajian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2009.